



HB X Sebut Akibat Susahnya Pembatasan

GUBERNUR DIJ Hamengku Buwono X mengatakan, penularan virus yang berakibat pada lonjakan kasus positif Covid-19 dimungkinkan karena pembatasan kegiatan yang mulai longgar. "Ya, seperti dari departemen (Kementerian Kesehatan) belum ada sesuatu (kebijakan) yang lebih signifikan. Tapi memang coba untuk pembatasan-pembatasan itu diketati," ujar HB X di Kompleks Kepatihan Jogja, kemarin (3/2).

Kalau pun memang ada pengetatan dan pembatasan kegiatan, lanjut HB X, pada praktiknya tidak semudah dengan peraturan yang dituliskan itu. Terlebih kondisi pandemi sudah berlangsung cukup lama dan kejenuhan masyarakat terus saja meningkat.

"Pengetatan di semua level, tapi itu

kan kalau saya hanya pengetatan kita bisa ngomong tapi faktanya di lapangan tidak mudah. Apalagi *ngomong* berkerumun tidak semudah yang ditulis, faktanya itu begitu," jelas HB X.



WULAN YANUARHATI/RADAR JOGJA
Hamengku Buwono X

Di sisi lain bapak lima puteri ini juga menggaris-bawahi kesadaran masyarakat mulai rendah terhadap protokol kesehatan Covid-19, ditambah kepercayaan akan keberadaan virus juga mulai menurun. Hal ini berakibat terjadi penu-

laran yang masif sebab minimnya kehati-hatian.

"Karena masyarakatnya *rumangsane* (merasa) Jogja se-Jawa Bali rendah sekali *ming kari 10 uwong* (penularan hanya 10 orang, *Red*). *Rumangsane* terus bebas biar pun kita selalu *ngomong* tetap prokes. Tapi anggapan masyarakat seperti *wis bebas*," paparnya.

Raja Keraton Jogja ini sendiri merasa khawatir apabila kesadaran tidak ditumbuhkan lagi dan masyarakat tidak bisa mengontrol dirinya, maka Covid-19 tidak akan pernah hilang. Justru akan terus bermutasi menjadi varian-varian baru.

"Kalau yang lain *gak* merasa takut, ya susah karena kebijakan apa pun selama masyarakat tidak bisa mengontrol dirinya sendiri, akhirnya yang terjadi

mutasi *gitu loh*," tambahnya.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD DIJ Eko Suwanto mengatakan, ada beberapa hal yang harus dilakukan Pemprov DIJ untuk menekan laju persebaran Covid-19. Yakni Pemprov harus punya tanggung jawab untuk secara disiplin tegas membantu masyarakat menegakkan protokol kesehatan.

Selain itu Pemprov juga bertanggung jawab membantu masyarakat dengan memfasilitasi sarana dan prasarana dalam rangka menegakkan prokes khususnya di tempat umum. "Aplikasi PeduliLindungi juga dioptimalisasi karena saya melihat banyak yang tidak disiplin. Perlu mengajak masyarakat untuk *stay home* jika tidak benar-benar ada kegiatan yang tidak bisa diwakilkan," ujarnya. (cr4/laz/rg)

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut |
|--------------------|--------------|-------|-----------------|
| 1. Dinas Kesehatan | Netral | Biasa | Untuk Diketahui |
| 2. Sat Pol PP | | | |

Yogyakarta, 02 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005